

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Anggaran Pembangunan Kelistrikan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten bulungan diatur berdasrkan Perda Kabuaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010, Perda kabupaten Bulungan Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Implementasi anggaran kelistrikan dapat diketahui melalui data-data yang telah dikumpulkan dalam proses penelitian Implementasi Anggaran Pembangunan Kelistrikan peneliti menggunakan model Implementasi kebijakan didasarkan pada teori yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn. sebagai berikut :

##### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Implementasi Pembangunan Kelistrikan

Dengan melihat gambaran dan identifikasi permasalahan pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan, dengan memperhatikan visi dan misi serta 4 skala prioritas, maka ditetapkan Tujuan kebijakan sebagai berikut.

1. Peningkatan sumberdaya manusia sarana dan prasarana
2. Peningkatan penyediaan distribusi jaringan listrik
3. Pelayanan perijinan di bidang pertambangan umum yang akuntabel
4. Pengawasan di bidang pertambangan umum dan energi yang lebih intensif

Dalam menjalankan Kebijakan tentang energi kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan mempunyai program-program yang akan dijalankan berupa kegiatan-kegiatan dan mempunyai sasaran atau target (ukuran) yang akan dicapai dalam merealisasikan Pembangunan kelistrikan

. Dapat kita lihat dalam tabel berikut tentang program Dinas Pertambangan dan energi kabupaten Bulungan.

**Tabel 5.1.**  
**Program Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan Tahun 201**

NO	PROGRAM UTAMA	URAIAN	INDIKATOR
1	Program pembinaan dan pengawasan bid. pertambangan, kelistrikan, dan SDA	Kegiatan pengawasan Pembangkit listrik Tenaga Surya dan jaringan listrik	Input : Jumlah dana Keluaran Terpeliharanya jaringan PLTS dan jaringan listrik Hasil : berfungsinya PLTS dan jaringan Listrik
2.	Program pembinaan dan pengembangan bidang kewanagalistrikan	Tata batas Areal PLTMH S.Brun kecil dan Giram nyobo	Input : Jumlah dana Keluaran Tercapainya tata batas areal PLTMH Hasil : Tersedianya listrik desa
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. sekatak	Input : Jumlah dana Keluaran Terpeliharanya lampu jalan Hasil : berfungsinya lampu jalan
		Peningkatan saluran Pembawa percontohan PLTMH di desa Brun kecil desa long bang	Input : Jumlah dana Keluaran Terpeliharanya PLTMH Hasil : berlungsinya PLTMH
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Barat	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhinya jaringan listrik pedesaan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Selor	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhinya jaringan listrik pedesaan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Peso	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhinya jaringan listrik pedesaan
		Pemeliharaan LPJU dan LPJUTS	Input : Jumlah dana Keluaran Terpeliharanya LPJU dan LPJUTS Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan LPJU dan LPJUTS

Tabel 5.2.

## Program Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan

NO	PROGRAM UTAMA	URAIAN	INDIKATOR
1	Program pembinaan dan pengawasan bid. pertambangan, kelistrikan, dan SDA	Kegiatan pengawasan ketenaga listrikan dan sumber daya air	Input : Jumlah dana Keluaran Tercapainya pengawasan ketenagalistrikan Hasil : Terlaksananya pengawasan ketenagalistrikan
		Pembinaan dan pengembangan Bidang keteanagalistrikan dan SDA	Input : Jumlah dana Keluaran Tercapainya pembinaan dan pengembangan keteanagalistrikan dan Sumber daya air Hasil : Terlaksananya lapotran koordinasi
2	Program pembinaan dan pengembangan bidang keteanagalistrikan	Koordinasi pengembangan keteanagalistrikan	Input : Jumlah dana Keluaran Tercapainya pengawasan keteanagalistrikan Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi
		Pemeliharaan dan optimalisasi lampu jalan	Input : Jumlah dana Keluaran Terpeliharanya lampu jalan Hasil : berfungsinya lampu jalan
		Pemeliharaan percontohan PLTMH sungai Brun kecil dan long bang	Input : Jumlah dana Keluaran Terpeliharanya PLTMH Hasil : berfungsinya PLTMH
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhnya jaringan listrik pedesaan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Tengah	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhnya jaringan listrik pedesaan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Utara dan sekatak	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhnya jaringan listrik pedesaan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Timur	Input : Jumlah dana Keluaran Terbangunya jaringan listrik pedesaan Hasil : Terpenuhnya jaringan listrik pedesaan



TABEL 5.3

## Matrik Kebijakan Pembangunan Kelistrikan

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	WILAYAH
1. Peningkatan SDM, Sarana dan Prasarana	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	1. Pembangunan gedung perkantoran 2. Pengadaan kendaran dinas / operasional 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pertambangan dan energi
	2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Rapat Kerja 2. Rapat kordinasi daerah	
2. Peningkatan penyediaan distribusi jaringan listrik	1. Program pembinaan dan pengembangan bi dang ketenagalistrikan	1. Pemeliharaan dan optimalisasi lampu penerangan jalan 2. Pembangunan dan pemasangan jaringan listrik 3. Pembangunan dan pemasangan jaringan listrik perdesaan 4. Penyediaan ketenagalistrikan daerah 5. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Kecamatan Tanjung selor Kecamatan Tanjung Palas Timur Kec. Tjng selor. Kec. Tjg Palas barat, Sekatak, peso Kabupaten Bulungan
3. Pelayanan perijinan di bidang pertambangan umum yang akuntabel	1. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan / operasional 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik 3. Pengawasan jasa surat menyurat 4. Penyediaan barang, cetakan dan pengadaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang perundangan 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertambangan dan energi
4. Pengawasan di bidang pertambangan umum dan energi yang lebih intensif	1. Program pembinaan dan pengawasan bid. pertambangan, kelistrikan, dan SDA	1. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bid. pertambangan 2. Pengawasan pertambangan umum 3. Pengawasan ketenagalistrikan dan sumberdaya air 4. Pembinaan dan pengembangan bidang pertambangan.	Dinas Pertambangan dan Energi

Dari Tabel diatas terlihat Program – program kegiatan Dinas Pertambangan dan energy Kabupaten Bulungan dapat terlihat Program yang bertujuan untuk Peningkatan sarana dan Prasaran termasuk Pembangunan Kelistrikan seperti adanya Pembangunan Jaringan listrik Pedesaan yang berfungsi sebagai penyalur jaringan antara pembangkit yang kemudian dihantarkan melalui jaringan distribusi yang dibangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta Pengawasan terhadap Pembangunan kelistrikan.

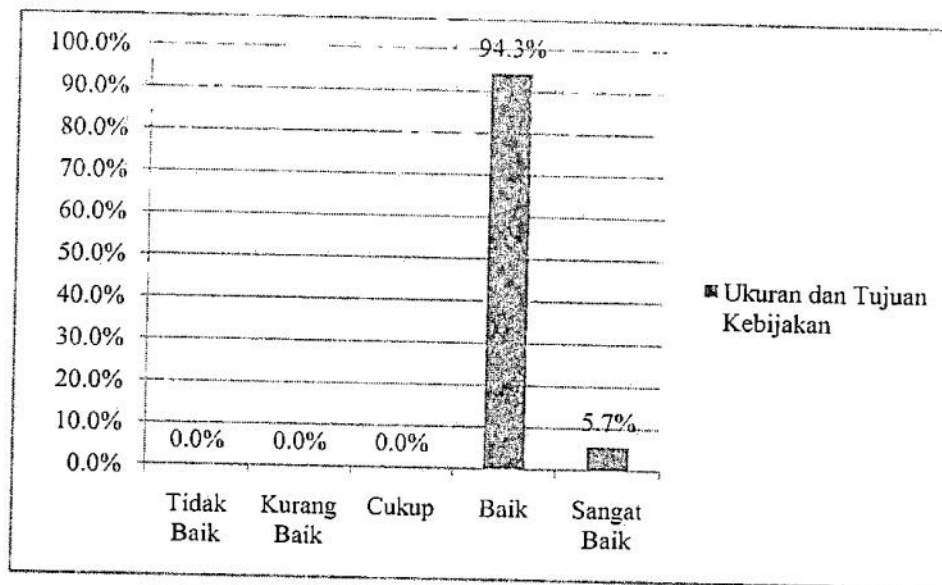
Kinerja implementasi kebijakan apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang beradapada tingkat pelaksana kebijakan. Dengan ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan yang ideal (bahkan terlalu utopsi) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka kebijakan akan lebih mudah direalisasikan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, apabila kebijakan tersebut terlalu idelis juga akan berakibat sulitnya implementasi dijalankan. Indikator dari ukuran dan tujuan kebijakan adalah sasaran kebijakan, kecermatan kebijakan, kejelasan kebijakan, dan kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan.

Ukuran dan tujuan kebijakan dapat diketahui dari beberapa indikator, yaitu sasaran kebijakan, kecermatan kebijakan, kejelasan kebijakan, dan kepuasan masyarakat.

Penilaian informan terhadap ukuran dan tujuan kebijakan dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 5.1.

Proporsi Pendapat Responden tentang Ukuran dan Tujuan Kebijakan



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dipahami penilaian responden terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas sebanyak 33 orang (94,3%) dari total responden menyatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan mengenai anggaran kelirtilikan tergolong baik. Tabel dan grafik di atas juga menunjukkan bahwa terdapat 2 orang responden (5,7%) yang menyatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan tergolong sangat baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan mengenai anggaran pembangunan kelistrikan berdasarkan Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan dapat dikatakan baik. Hal ini dari mayoritas jawaban responden yang berada dalam kategori baik. Ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dinilai melalui aspek sasaran kebijakan, keterangan mengenai kegunaan kebijakan, sosialisasi, kelengkapan isi dan keterangan mengenai

pelaksanaan kebijakan, wewenang Dinas Pertambangan dan Energi untuk menjelaskan kepada masyarakat, serta kesediaan Dinas Pertambangan dan Energi menjelaskan secara lengkap pelaksanaan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.

Apabila dilihat dari sasaran kebijakan dapat dikatakan bahwa sasaran pembangunan kelistrikan cukup jelas sebagaimana tertuang dalam salah satu visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, yaitu meningkatkan penyediaan distribusi jaringan listrik. Dengan sasaran tersebut, maka anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kelistrikan seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik dalam program-program pembangunan kelistrikan. Dalam hal kecermatan kebijakan tentunya anggaran pembangunan kelistrikan sudah dapat dikatakan cermat. Kecermatan ini dapat terlihat dari proporsi realisasi pembangunan kelistrikan terhadap anggaran. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak terhadap program pembangunan kelistrikan yang melebihi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan kelistrikan telah disusun dengan cermat, dan mempertimbangkan faktor kebutuhan masyarakat.

Dalam hal kejelasan kebijakan dapat dikatakan bahwa program kelistrikan yang disusun dan dilaksanakn oleh Dinas Pertambangan dan Energi cukup jelas. Hal ini dapat dilihat dari laporan proyek pengerjaan program pembangunan kelistrikan. Begitu pula halnya dengan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat tentunya mengalami peningkatan terkait distribusi jaringan listrik yang semakin meluas hingga ke desa-desa.

Oleh karena itu, dalam kerangka tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan mengenai anggaran pembangunan kelistrikan sudah dapat dikatakan baik.

Mayoritas jawaban responden pada kategori tersebut tergolong baik. Namun demikian, masih ditemukan adanya keluhan masyarakat serta kritik masyarakat terhadap Dinas Pertambangan dan Energi terkait pelaksanaan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Hasil analisis *Chi Square* terhadap jawaban responden mengenai ukuran dan tujuan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Nilai	Pejabat Dinas	Masyarakat	Swasta
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Cukup	-	-	-
Baik	33	33	32
Sangat baik	2	2	3
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Chi Square (<math>\chi_{hitung}^2</math>)</b>		<b>7.722</b>	<b>22.626</b>
<b>Asymp. Sig.</b>		<b>0.005</b>	<b>0.000</b>
<b><math>\chi^2_{tabel(0,95)=}</math></b>		<b>3.84</b>	<b>3.84</b>

Sumber: data diolah (2013)

Tabel di atas menunjukkan nilai  $\chi_{hitung}^2 = 7,722$  dengan nilai P sebesar 0,005 untuk perbedaan antara pendapat Dinas dengan masyarakat dan 22,626 dengan nilai P sebesar 0,000. Adapun nilai  $\chi_{tabel}^2$  pada taraf kesalahan 5% adalah sebesar 3,84 untuk kedua pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$ , yaitu  $7,722 > 3,84$  dan  $22,262 > 3,84$  dengan nilai  $P > 0,05$ . Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penerimaan  $H_a$  tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapat Dinas dengan masyarakat maupun antara pendapat Dinas dengan pihak swasta. Dengan kata lain tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Dinas dengan pendapat masyarakat dan antara pendapat Dinas dengan pendapat pihak swasta mengenai ukuran dan tujuan kebijakan. Sebagian besar responden dari pihak Dinas, masyarakat, maupun pihak swasta menilai bahwa ukuran dan tujuan kebijakan tergolong baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh fakta bahwa ukuran kebijakan mengenai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah memadai. Hal ini tergambar melalui kutipan wawancara berikut.

“Sudah memadai, meskipun banyak permintaan masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan, tetapi Pemda Kabupaten Bulungan tetap menindaklanjuti secara bertahap, sesuai ketersediaan anggaran melalui APBD, APBD Propinsi dan APBN” (Hasil Wawancara Informan 1, 2013).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa ukuran kebijakan mengenai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan telah memadai meskipun masih banyak permintaan masyarakat yang belum terpenuhi. Sampai dengan saat ini, program pembangunan kelistrikan berhasil menyediakan pemenuhan kebutuhan listrik 600 MW dengan membangun PLTU, PLTGB, PLTMH, PLTD, PLTS. Namun demikian masih terdapat daftar tunggu pemohon untuk sambungan baru. Pemda Kabupaten Bulungan selalu berusaha untuk menindaklanjuti hal tersebut secara bertahap. Pendapat informan lainnya mengenai Perda

APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Cukup baik atau seimbang dan harus terus ditingkatkan baik dari sektor kebijakan maupun implementasi agar dapat mendekati kebutuhan daerah atau masyarakat dan pemeliharaan hasil implementasi juga harus ditingkatkan” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Hasil wawancara di atas sesuai dengan pendapat dari informan lainnya. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa ukuran kebijakan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah cukup seimbang. Namun demikian, anggaran tersebut masih perlu ditingkatkan agar mencapai dan memenuhi kebutuhan daerah. Selain itu, juga perlu adanya anggaran untuk pemeliharaan. Selain ukuran, kebijakan tentunya juga memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Tujuan kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penerangan sampai masyarakat pedesaan dan sebagai faktor pendukung pembangunan pengembangan masyarakat, pemerataan, dan investasi bidang pertambangan, pertanian, dan perkebunan” (Hasil Wawancara Informan 1, 2013).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan mengenai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan hingga ke pedesaan. Selain itu, Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga diperlukan sebagai faktor pendukung pembangunan khususnya di bidang kelistrikan. Dari implementasi yang terjadi di lapangan dapat diketahui bahwa implementasi Perda APBD

Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah hampir sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Secara umum sudah mendekati benar. Artinya, kebijakan yang diambil merujuk kepada kebutuhan masyarakat melalui Musrebang, pelaksanaan, atau implementasi (realisasi fisik) di lapangan juga mendekati sempurna. Walaupun harus ada perbaikan dan peningkatan di kedua sektor” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Kutipan di atas menjelaskan tentang kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Namun demikian, tentunya terdapat inkonsistensi antara pendapat tersebut dengan kondisi di lapangan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan target dan capaian dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, di lain sisi masih terdapat masyarakat yang menunggu agar memperoleh sambungan listrik.

**b. Sumber-sumber Kebijakan Implementasi Anggaran Pembangunan Kelistrikan**

Implementasi kebijakan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tentunya memerlukan sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan antara lain sumber daya manusia, sumber keuangan, serta fasilitas.

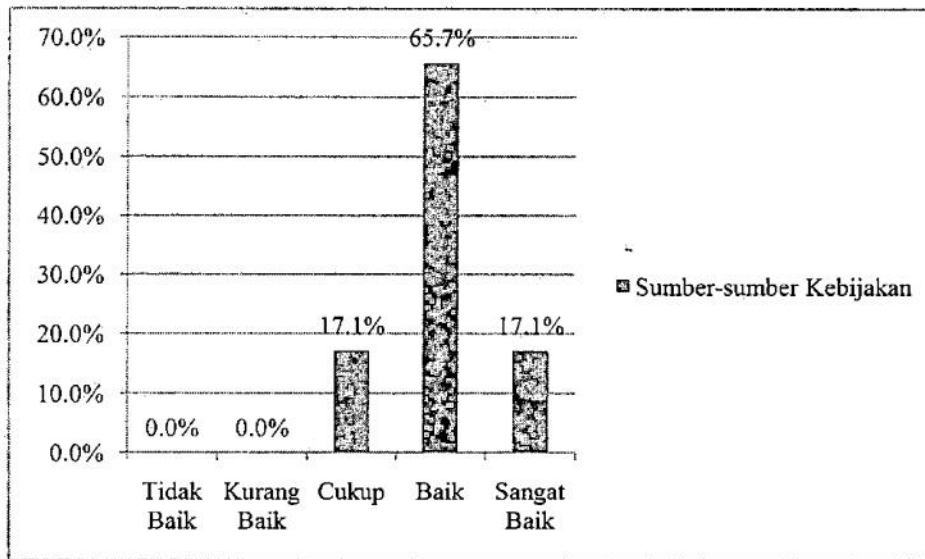


Selain kecukupan jumlah atau kuantitas, tentunya diharapkan sumber daya yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik.

Penilaian responden terhadap sumber-sumber kebijakan dapat juga digambarkan sebagaimana berikut.

Grafik 5.2.

Proporsi Pendapat Responden tentang Sumber-sumber Kebijakan



Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dipahami bahwa sumber-sumber kebijakan bagi implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah tergolong baik. Hal ini dapat diketahui dari pendapat mayoritas responden yang termasuk dalam interval kategori baik, yaitu sebanyak 23 orang (65,7%). Pada dasarnya sumber-sumber kebijakan terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan fasilitas. Sumberdaya manusia dapat dikatakan sudah mencukupi baik dalam jumlah maupun dalam kompetensi. Sumberdaya manusia yang melaksanakan kebijakan merupakan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang kelistrikan. Begitu pula halnya dengan sumberdaya keuangan

dan fasilitas. Dalam hal keuangan telah tersedia anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan kelistrikan.

Pada tahun 2010, DPA (Daftar Pengisian Anggaran) adalah sebesar Rp. 14,466,556,817,- lebih besar apabila dibandingkan DPA (Daftar Pengisian Anggaran) tahun 2011, yaitu Rp. 4,422,692,925,-, dan tahun 2012, yaitu Rp. 1,158,201,500,-. Begitu pula halnya dengan realisasi anggaran pembangunan kelistrikan. Realisasi pada tahun 2010 adalah Rp. 12,643,123,434 atau sebesar 87,40% dari anggaran pembangunan kelistrikan. Pada tahun 2011, persentase realisasi program terhadap anggaran juga mengalami penurunan, yaitu menjadi Rp. 3,583,927,976,- atau sebesar 81,03% dari total anggaran. Pada tahun 2012, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembangunan mengalami penurunan menjadi Rp. 1,099,182,000,-. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, realisasi telah mencapai 94,90%.

Hasil kuesioner mengenai sumber-sumber kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa ada responden yang berpendapat bahwa implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tergolong cukup ataupun sangat baik. Jumlah responden pada masing-masing kategori tersebut adalah sebanyak 6 orang (17,1%).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparat pelaksana pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan untuk mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi sudah tergolong baik. Begitu pula halnya dengan kecukupan dana untuk

mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan .pada dasarnya juga sudah tergolong baik. namun demikian masih ada kekurangan dalam hal jumlah aparat pelaksana Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Begitu pul halnya dengan sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.

Hasil analisis *Chi Square* terhadap jawaban responden mengenai sumber-sumber kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.

## Sumber-sumber Kebijakan

Nilai	Pejabat Dinas	Masyarakat	Swasta
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Cukup	6	9	7
Baik	23	21	23
Sangat baik	6	5	5
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Chi Square</b>		<b>37.892</b>	<b>26.740</b>
<b>Asymp. Sig.</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
$\chi^2_{tabel(0.95)}$		<b>9.49</b>	<b>5.99</b>

Sumber: data diolah (2013)

Tabel di atas menunjukkan nilai  $\chi_{hitung}^2 = 37,892$  dengan nilai P sebesar 0,000 untuk perbedaan antara pendapat Dinas dengan masyarakat dan 26,740 dengan nilai P sebesar 0,000. Adapun nilai  $\chi_{tabel}^2$  pada taraf kesalahan 5% adalah sebesar 9,49 untuk kedua pengujian. Berdasarkan

hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$ , yaitu  $37,892 > 9,49$  dan  $26.740 > 9,49$  dengan nilai  $P > 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penerimaan  $H_a$  tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapat Dinas dengan masyarakat maupun antara pendapat Dinas dengan piha swasta dalam hal sumber-sumber kebijakan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Dinas dengan pendapat masyarakat dan antara pendapat Dinas dengan pendapat pihak swasta mengenai sumber-sumber kebijakan. Sebagian besar responden dari pihak Dinas, masyarakat, maupun pihak swasta menilai bahwa sumber-sumber kebijakan tergolong baik.

Pada dasarnya sumber daya manusia dapat dikatakan sudah memadai dalam mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Sudah memadai, dan Pemda Kabupaten bulungan melibatkan instansi teknik terkait sebagai tenaga teknis di bidangnya” (Hasil Wawancara Informan 1, 2013).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, Dinas Pertambangan dan energi kabupaten Bulungan telah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, Dinas Pertambangan dan Energi juga melibatkan instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diperoleh

dari informan lainnya juga menjelaskan tentang kondisi sumber daya manusia pelaksana. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Sumber daya manusia cukup memadai. Intinya harus terus ditingkatkan melalui pengalaman di lapangan maupun melalui pelatihan dan bimbingan teknis” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa pada sumber daya manusia terbilang cukup memadai. Diharapkan sumber daya manusia dapat meningkatkan kompetensinya, baik melalui pengalaman kerja maupun melalui pelatihan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat informan 2 yang menyatakan bahwa sumber daya manusia sudah memadai.

Dalam hal sumber daya keuangan dapat dipahami bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari wawancara informan 1 yang menyatakan bahwa “dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia” (Hasil Wawancara Informan 1, 2013). Berdasarkan informasi dari informan 3 dapat diketahui bahwa sumber daya keuangan yang dianggarkan sudah cukup memadai. Hal ini dapat dipahami dari kutipan berikut.

“Cukup memadai, walau belum mencakup semua kebutuhan masyarakat. Namun secara bertahap terus ditingkatkan agar anggaran yang tersedia dapat memenuhi target kebutuhan masyarakat (sesuai Pagu Anggaran yang disediakan pada APBD 2010-2012)” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan kelistrikan melalui Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan dapat dikatakan sudah cukup memadai. Namun demikian, anggaran yang tersedia tersebut harus ditingkatkan. Peningkatan tersebut harus dilakukan mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal fasilitas, sumber daya kebijakan dapat dikatakan sudah cukup memadai. Hal ini dapat diketahui dari pendapat informan 1 penelitian. Penilaian ini juga sesuai dengan pendapat informan 3 sebagaimana kutipan berikut.

“fasilitas cukup baik, ditinjau dari segi administrasi, sedangkan peralatan pendukung harus terus ditingkatkan. Khusus mengenai pembangunan kelistrikan fasilitas pendukung yang penting ketika pemeriksaan barang dan saat perangkat tersebut terpasang. Penggunaan badan-badan resmi untuk SLO dan kerjasama (pemeriksaan bersama PT. PLN-SLO)” (Hasil Wawancara, 3, 2013).

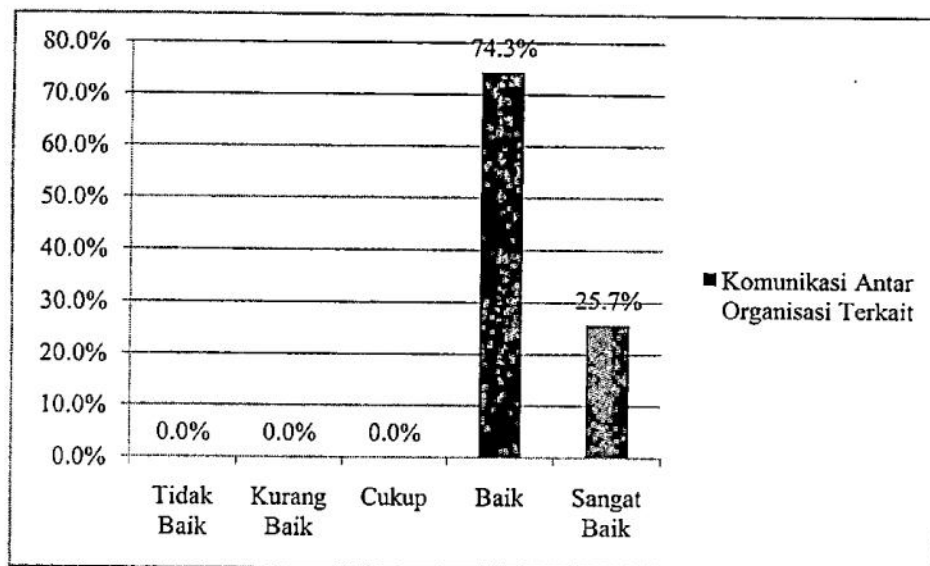
Kutipan di atas menjelaskan bahwa fasilitas yang tersedia bagi implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah cukup baik terutama dalam segi administrasi. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan peralatan pendukung terutama dalam pembangunan kelistrikan. Sampai dengan saat ini, berdasarkan data mengenai anggaran dan realisasi pembangunan kelistrikan yang bersumber dari dana APBD dapat dipahami bahwa anggaran terus mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Pada bab sebelumnya telah diuraikan penurunan anggaran maupun realisasi pembangunan kelistrikan. Namun demikian, penurunan tersebut dapat terjadi karena

Selain itu juga merujuk pada Pembangunan secara keseluruhan melalui BAPEDA sebagai Badan Perencanaan Daerah yang merencanakan Pembangunan.

Koordinasi tersebut merupakan mekanisme yang baik dalam implementasi kebijakan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Berikut penilaian responden mengenai komunikasi antar organisasi terkait. Proporsi pendapat responden juga dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 5.3.

Proporsi Pendapat Responden tentang Komunikasi antar Organisasi Terkait



Hal ini dapat diketahui dari jawaban mayoritas responden terkait komunikasi antar organisasi yang terkait dengan implementasi Perda APBD. Komunikasi antara organisasi terkait dilakukan melalui rapat

koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Cabang Berau Ranting Tanjung Selor dan instansi teknis lainnya. Rapat yang dilakukan dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Cabang Berau Ranting Tanjung Selor hanya bersifat konsultasi. Rapat yang bersifat penyusunan rencana bersama dilakukan dengan pihak-pihak swasta yang terkait dengan pembangunan kelistrikan. Jumlah responden dengan pendapat mengenai komunikasi antar organisasi terkait yang tergolong baik adalah sebanyak 26 orang (74,3%). Tabel dan gambar di atas juga menunjukkan bahwa masih terdapat 9 orang (25,7%) yang berpendapat bahwa komunikasi antar organisasi terkait sudah tergolong sangat baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, komunikasi organisasi terkait dalam implementasi anggaran pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan sudah tergolong baik.

Hasil analisis *Chi Square* terhadap jawaban responden mengenai komunikasi antar organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6.

## Komunikasi antar Organisasi

Nilai	Pejabat Dinas	Masyarakat	Swasta
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Cukup	-	-	-
Baik	26	27	26
Sangat baik	9	8	9
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Chi Square</b>		<b>16.490</b>	<b>10.637</b>
<b>Asymp. Sig.</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
$\chi^2_{tabel(0,95)}$		<b>3.84</b>	<b>3.84</b>

Sumber: data diolah (2013)



Tabel di atas menunjukkan nilai  $\chi_{hitung}^2 = 16,490$  dengan nilai P sebesar 0,000 untuk perbedaan antara pendapat Dinas dengan masyarakat dan 10,637 dengan nilai P sebesar 0,000. Adapun nilai  $\chi_{tabel}^2$  pada taraf kesalahan 5% adalah sebesar 3,84 untuk kedua pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$ , yaitu  $16,490 > 3,84$  dan  $10,637 > 3,84$  dengan nilai  $P > 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penerimaan  $H_a$  tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapat Dinas dengan masyarakat maupun antara pendapat Dinas dengan pihak swasta dalam hal komunikasi antar organisasi. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Dinas dengan pendapat masyarakat dan antara pendapat Dinas dengan pendapat pihak swasta mengenai komunikasi antar organisasi. Sebagian besar responden dari pihak Dinas, masyarakat, maupun pihak swasta menilai bahwa komunikasi antar organisasi tergolong baik.

Proses dan cara penyampaian kebijakan antara penyusun dan pelaksana Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Komunikasi yang baik ini telah terjadi pada berbagai aspek, diantaranya proses dan cara penyampaian kebijakan, pemahaman dinas-dinas terkait terhadap implementasi anggaran, kejelasan rincian pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, dan ketetapan informasi yang disampaikan oleh penyusun Perda, serta Respon Dinas Pertambangan dan Energi mengenai implementasi anggaran pembangunan

kelistrikan sesuai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi yang terjadi antar organisasi terkait sangat mendukung keberhasilan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Komunikasi yang terjadi dapat dikatakan sudah baik, baik antara penyusun Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 dengan Dinas pertambangan dan Energi sebagai dinas pelaksana maupun antara Dinas pertambangan dan Energi sebagai dinas pelaksana dengan masyarakat. Hal ini juga dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Komunikasi terhadap anggaran melalui mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan. Setiap usulan sampai menjadi Perda diharapkan sudah digodok dalam mekanisme tersebut. maka, komunikasi melalui rapat-rapat pembahasan atau komunikasi sudah cukup baik dengan selalu melibatkan pihak-pihak terkait” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa komunikasi antara penyusun Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 dengan Dinas pertambangan dan Energi sebagai dinas pelaksana sudah terbilang cukup baik. komunikasi ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun bentuk komunikasi tersebut adalah melalui rapat-rapat pembahasan perda. Begitu pula halnya dengan komunikasi antara Dinas Pertambangan dan Energi sebagai dinas pelaksana dengan masyarakat. Komunikasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan pihak swasta pelaksana lapangan.

Komunikasi antara Dinas pertambangan dan Energi sebagai dinas pelaksana dengan masyarakat dapat diketahui dari kutipan di bawa ini.

“Komunikasi dinas kepada masyarakat dan sebaliknya cukup baik. dari proses usulan sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan masa pemeliharaan, pembangunan jaringan listrik, selalu masyarakat dilibatkan dalam komunikasi yang baik” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa komunikasi dinas kepada masyarakat dan juga dari masyarakat terhadap dinas pelaksana Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan telah tergolong cukup baik. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku dinas pelaksana sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat. Komunikasi intensif ini dilakukan dari proses usulan sampai dengan pemeliharaan, termasuk pada proses pelaksanaan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor komunikasi sudah dapat dikatakan baik dalam implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.

Dalam penetapan anggaran APBD bidang pembangunan kelistrikan terdapat beberapa langkah. Penetapan anggaran dimulai dari pengajuan usulan program pembangunan kelistrikan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku dinas pelaksana kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam hal ini, Bappeda memberikan batas waktu kepada Dinas Pertambangan dan Energi. Bappeda kemudian melakukan penyaringan terhadap semua usulan dari program pembangunan kelistrikan tersebut. Hal

ini dilanjutkan dengan proses pembuatan dan penyusunan *draft* APBD-P untuk diajukan ke Dewan. Disamping penyusunan APBD-P tersebut, pihak Bappeda juga telah menyelesaikan kegiatan Musrenbang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Setelah pembahasan, APBD-P kemudian disahkan bersama pihak DPRD. Setelah pengesahan tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi dapat melakukan perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Berdasarkan proses tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi antara masing-masing pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyusunan, pengesahan, dan perencanaan program pembangunan kelistrikan sudah berjalan dengan baik.

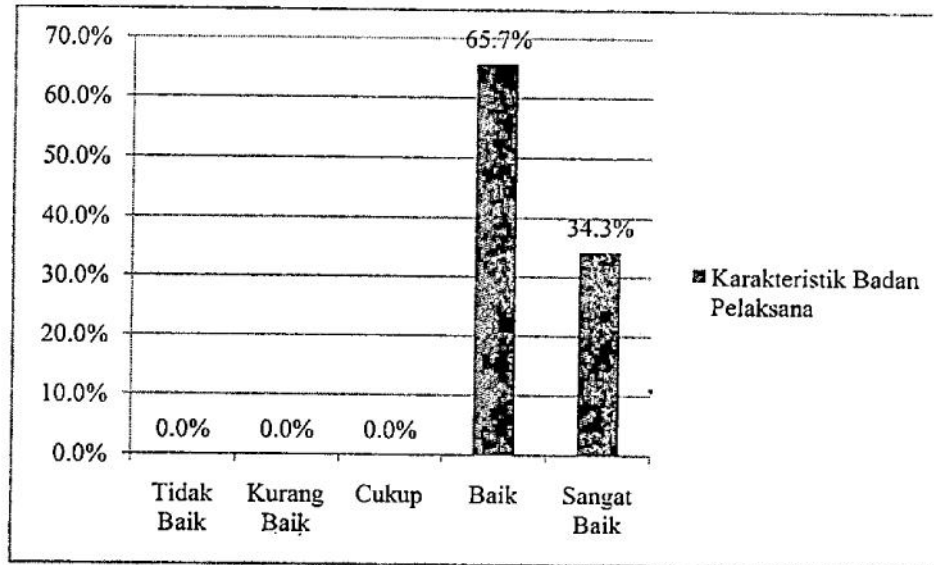
**d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana**

Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Bulungan sebagai Dinas Pelaksana tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut tentunya akan berpengaruh pada kinerja Dinas Pertambangan dan Energi dalam mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena kinerja implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta kesesuaian dengan Dinas Pertambangan dan Energi sebagai agen pelaksananya. Indikator dari karakteristik badan-badan pelaksana adalah kualitas, komitmen, dan sifat. Penilaian responden mengenai karakteristik badan pelaksana dalam diketahui dari hasil kuesioner berikut.

Proporsi pendapat responden mengenai karakteristik badan pelaksana juga dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 5.4.

Proporsi Pendapat Responden tentang Karakteristik Badan Pelaksana



Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dipahami bahwa karakteristik badan pelaksana Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah tergolong baik. Hal ini diketahui dari jawaban mayoritas responden terhadap aspek-aspek karakteristik badan pelaksana yang tergolong dalam kategori baik, yaitu sebanyak 23 orang (65,7%). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa ada responden yang menilai bahwa karakteristik badan pelaksana implementasi anggaran kelistrikan Kabupaten Bulungan sudah dalam kategori sangat baik. Adapun jumlah responden yang menilai bahwa karakteristik badan pelaksana Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tergolong sangat baik adalah sebanyak 12 orang (34,3%) dari total responden.

Hasil analisis *Chi Square* terhadap jawaban responden mengenai Karakteristik badan pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7.

## Karakteristik Badan Pelaksana

Nilai	Pejabat Dinas	Masyarakat	Swasta
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Cukup	-	-	1
Baik	23	21	19
Sangat baik	12	14	15
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Chi Square</b>		<b>20.311</b>	<b>17.776</b>
<b>Asymp. Sig.</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b><math>\chi^2_{tabel(0,95)}</math></b>		<b>3.84</b>	<b>5.99</b>

Sumber: data diolah (2013)

Tabel di atas menunjukkan nilai  $\chi_{hitung}^2 = 20,311$  dengan nilai P sebesar 0,000 untuk perbedaan antara pendapat Dinas dengan masyarakat dan 17,776 dengan nilai P sebesar 0,000. Adapun nilai  $\chi_{tabel}^2$  pada taraf kesalahan 5% adalah sebesar 3,84 untuk pengujian pertama dan 5,99 untuk pengujian kedua. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$ , yaitu  $20,311 > 3,84$  dan  $17,776 > 5,99$  dengan nilai  $P > 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penerimaan  $H_a$  tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapat Dinas dengan masyarakat maupun antara pendapat Dinas dengan pihak swasta dalam hal karakteristik badan pelaksana. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Dinas dengan pendapat masyarakat dan antara pendapat Dinas dengan pendapat pihak swasta mengenai karakteristik badan pelaksana. Sebagian besar responden

dari pihak Dinas, masyarakat, maupun pihak swasta menilai bahwa karakteristik badan pelaksana tergolong baik.

Petugas pelaksana dalam implementasi pembangunan kelistrikan sesuai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah memiliki kemampuan yang baik. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi anggaran pembangunan kelistrikan sesuai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga telah berjalan dengan baik. Dinas Pertambangan dan Energi juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan dalam mengimplemantasikan anggaran pembangunan kelistrikan. Budaya organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagai badan pelaksana pembangunan kelistrikan juga tergolong baik. Dinas Pertambangan dan Energi sebagai badan pelaksana pembangunan kelistrikan selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang implementasi anggaran. Begitu pula halnya dengan wewenang Dinas Pertambangan dan Energi dalam pelaksanaan pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan yang sudah sangat jelas.

Karakteristik badan pelaksana Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Dinas Pertambangan sebagai instansi teknis pelaksana. Selanjutnya, masyarakat mengharapkan agar pelayanan fasilitas penerangan segera terpenuhi” (Hasil Wawancara Informan 1, 2013).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan merupakan instansi teknis pelaksana.

Melalui instansi tersebut, masyarakat memiliki harapan yang sangat besar agar fasilitas penerangan segera terpenuhi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Karakteristik badan pelaksana juga dapat dipahami dari kutipan berikut.

“Sesuai visi dan misi dinas, maka karakter dinas adalah mensukseskan atau mengimplementasikan APBD dengan baik, benar, aman, lancar, selalu memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan sanggup mengamankan hasil pekerjaan agar berguna dan dapat dinikmati terus menerus.” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Bulungan selaku instansi teknik pelaksana memiliki karakteristik yang sesuai dengan visi dan misinya untuk mensukseskan serta mengimplementasikan APBD secara baik, benar, aman, dan lancar. Selain itu, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga menjadi instansi yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja ini tentunya juga diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan, serta pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan.

Berdasarkan kondisi di lapangan dapat diketahui bahwa pembangunan kelistrikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Dalam pelaksanaannya, berbagai program pembangunan kelistrikan kemudian melibatkan beberapa instansi yang terkait dan juga pihak-pihak



perusahaan. Dalam pembangunan jaringan listrik, pihak Dinas Pertambangan dan Energi melakukan koordinasi dengan PT. PLN, dan juga dengan beberapa pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan disebabkan proyek pembangunan kelistrikan dilelang kepada pihak swasta. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan terdapat beberapa pihak yang terkait, antara lain Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pihak pelaksana, PT. PLN sebagai instansi terkait, serta pihak swasta sebagai instansi pelaksana teknis di lapangan.

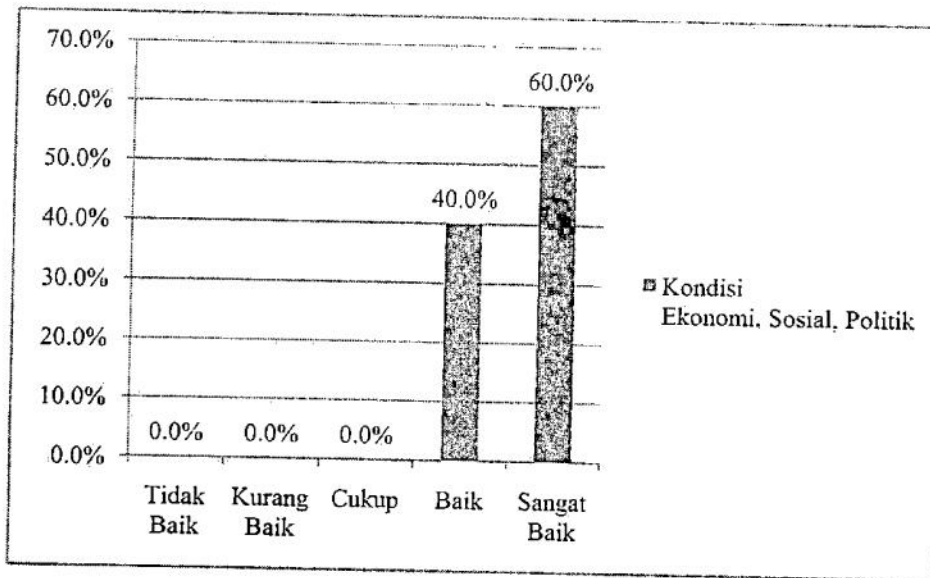
**e. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Dorongan dari lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Kondisi-kondisi ekonomi diuraikan berdasarkan ekonomi, sosial, dan politik. Penilaian informan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Proporsi pendapat responden mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat juga digambarkan sebagaimana berikut.

Grafik 5.5.

Proporsi Pendapat Responden tentang Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik



Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tergolong baik, bahkan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari jawaban mayoritas responden yang berada pada kategori sangat baik. Jumlah responden yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam kategori sangat baik adalah sebanyak 21 orang (60%). Responden yang menilai bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik tergolong baik adalah sebanyak 14 orang (40%).

Hasil analisis *Chi Square* terhadap jawaban responden mengenai Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Nilai	Pejabat Dinas	Masyarakat	Swasta
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Baik	14	14	13
Sangat baik	21	21	20
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Chi Square</b>		<b>14.464</b>	<b>12.676</b>
<b>Asymp. Sig.</b>		<b>0.000</b>	<b>0.002</b>
<b><math>\chi^2_{tabel(0,95)}</math></b>		<b>3.84</b>	<b>5.99</b>

Sumber: data diolah (2013)

Tabel di atas menunjukkan nilai  $\chi_{hitung}^2 = 14,464$  dengan nilai P sebesar 0,000 untuk perbedaan antara pendapat Dinas dengan masyarakat dan 12,676 dengan nilai P sebesar 0,002. Adapun nilai  $\chi_{tabel}^2$  pada taraf kesalahan 5% adalah sebesar 3,84 untuk pengujian pertama dan 5,99 untuk pengujian kedua. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$ , yaitu  $14,464 > 3,84$  dan  $12,676 > 5,99$  dengan nilai  $P > 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penerimaan  $H_a$  tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapat Dinas dengan masyarakat maupun antara pendapat Dinas dengan pihak swasta dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Dinas dengan pendapat masyarakat dan antara pendapat Dinas dengan pendapat pihak swasta mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sebagian besar responden dari pihak Dinas, masyarakat, maupun pihak

swasta menilai bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik tergolong sangat baik.

Dukungan masyarakat kepada Dinas Pertambangan dan Energi terkait implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan bahkan tergolong sangat baik. Dinas Pertambangan dan Energi memiliki sumber keuangan yang jelas dalam mengimplementasikan anggaran pengambungan kelistrikan sesuai Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tentunya memberikan pengaruh yang baik terhadap kondisi perekonomian.

Masyarakat juga memberikan respon yang baik terhadap implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Selain memperoleh dukungan dari masyarakat, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga memperoleh dukungan dari para elit dalam implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Dukungan dinas lain yang terkait dengan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan kepada Dinas Pertambangan dan Energi juga terbilang baik. Dalam implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Bulungan juga telah melibatkan pihak swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa implementasi anggaran pembangunan kelistrikan berdasarkan Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut.

“Sangat berpengaruh sebagai tolak ukur kinerja aparatur pemerintah, pejabat negara, dan jaminan pelaku ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan di segala sektor” (Hasil Wawancara Informan 3, 2013).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kelistrikan dapat mempengaruhi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila keberhasilan implementasi Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 dijadikan sebagai tolak ukur kinerja aparatur pemerintah dan pejabat negara. Keberhasilan implementasi Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 akan menjadi jaminan bagi para pelaku ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan di segala sektor. Hal ini juga diterangkan melalui hasil wawancara berikut.

“Ada, dengan tersambungny atau tersedianya listrik ke masyarakat maka biaya penerangan masyarakat dapat dihemat. Masyarakat dapat menggunakan teknologi-teknologi untuk bersosialisasi, bermasyarakat, berpolitik, dan meningkatkan usaha-usaha masyarakat yang menggunakan listrik” (Hasil Wawancara 3, 2013).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa pembangunan kelistrikan yang dilaksanakan melalui implementasi Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan

kelistrikan akan menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat menggunakan teknologi maju untuk bersosialisasi, bermasyarakat, maupun berpolitik. Selain itu, pembangunan kelistrikan melalui implementasi Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 juga dapat mendukung ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program yang tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Salah satunya adalah program Peningkatan Saluran Pembawa PLTMH pada tahun 2012 senilai Rp. 775.130.000. Realisasi dari program ini hanya sebesar Rp. 119.187.200. Hal ini disebabkan karena penutusan kontrak dengan pihak instansi teknis dalam pelaksanaan program. Pemutusan kontrak disebabkan tidak konsistennya pihak pelaksana teknis di lapangan dalam menyelesaikan program yang telah ditetapkan. Namun demikian, sebagian besar program pembangunan kelistrikan yang direncanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi tentunya sudah berjalan dengan baik. Program pembangunan yang berjalan dengan baik ini dapat disebabkan dukungan dan keberpihakan dari masyarakat yang juga membutuhkan pembangunan kelistrikan. Hal ini terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Bulungan.

**f. Kecenderungan para Pelaksana**

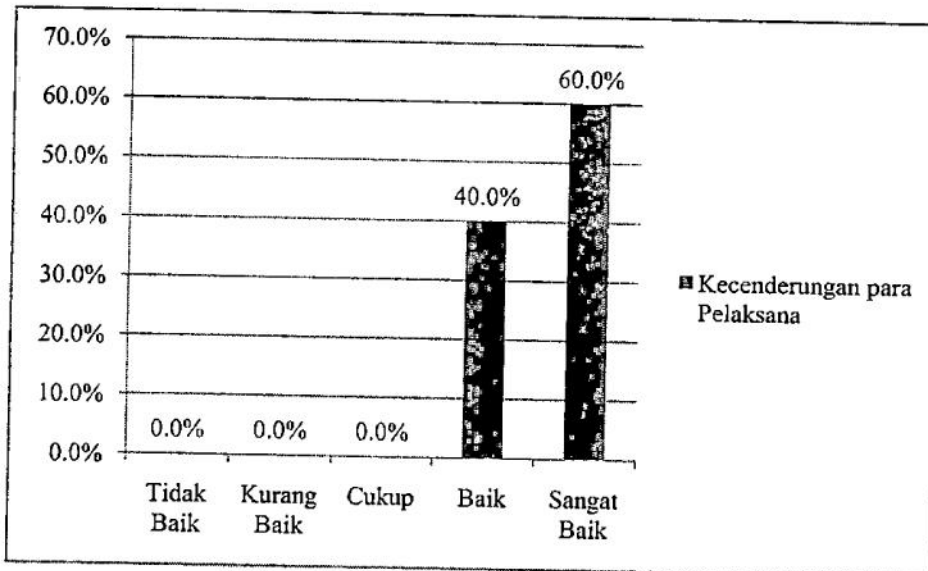
Sikap penerimaan atau penolakan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sebagai instansi pelaksana teknik akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan implementasi Perda APBD sektor

pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012. Hal ini dapat terjadi karena Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012 yang dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Berikut penilaian informan mengenai kecenderungan pelaksana.

Proporsi pendapat responden mengenai kecenderungan badan pelaksana dapat juga dilihat pada gambar berikut.

Graffik 5.6.

Proporsi Pendapat Responden tentang Kecenderungan Badan Pelaksana



Berdasarkan tabel dapat dipahami bahwa Dinas Pertambangan dan Energi sebagai badan pelaksana memiliki kecenderungan yang sangat baik. Hal ini diketahui dari penilaian mayoritas responden terhadap aspek-aspek kecenderungan badan pelaksana yang tergolong sangat baik, yaitu sebanyak 21 orang (60%). Tabel dan gambar di atas juga menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang berpendapat bahwa kecenderungan badan pelaksana tergolong baik, yaitu sebanyak 14 orang (40%).

Hasil analisis *Chi Square* terhadap jawaban responden mengenai Kecenderungan para pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9  
Kecenderungan Para Pelaksana

Nilai	Pejabat Dinas	Masyarakat	Swasta
Tidak Baik	-	-	-
Kurang Baik	-	-	-
Cukup	-	-	-
Baik	23	23	21
Sangat baik	12	12	14
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Chi Square</b>		<b>19.498</b>	<b>14.287</b>
<b>Asymp. Sig.</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
$\chi^2_{tabel(0,95)}$		<b>3.84</b>	<b>5.99</b>

Sumber: data diolah (2013)

Tabel Tabel di atas menunjukkan nilai  $\chi_{hitung}^2 = 19,498$  dengan nilai P sebesar 0,000 untuk perbedaan antara pendapat Dinas dengan masyarakat dan 14,287 dengan nilai P sebesar 0,000. Adapun nilai  $\chi_{tabel}^2$  pada taraf kesalahan 5% adalah sebesar 3,84 untuk kedua pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa  $\chi_{hitung}^2 > \chi_{tabel}^2$ , yaitu  $19,498 > 3,84$  dan  $14,287 > 3,84$  dengan nilai  $P > 0,05$ . Dengan



demikian, dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penerimaan  $H_a$  tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapat Dinas dengan masyarakat maupun antara pendapat Dinas dengan pihak swasta dalam hal kecenderungan para pelaksana. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Dinas dengan pendapat masyarakat dan antara pendapat Dinas dengan pendapat pihak swasta mengenai kecenderungan para pelaksana. Sebagian besar responden dari pihak Dinas, masyarakat, maupun pihak swasta menilai bahwa kecenderungan para pelaksana tergolong baik.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan memiliki karakteristik yang baik dalam melaksanakan implementasi anggaran pembangunan kelistrikan dalam Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan Perda APBD sektor pertambangan dan energi Kabupaten Bulungan tahun 2010-2012. Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan memiliki sikap yang netral mengenai pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Tidak terjadi penolakan dari pelaksana kebijakan mengenai pembangunan kelistrikan sesuai

dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.

Apabila dilihat dari segi perhatian dan penghayatan dinas dalam melaksanakan pembangunan kelistrikan dapat dikatakan bahwa perhatian dan penghayatan pelaksana kebijakan mengenai pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sudah tergolong baik. Dinas Pertambangan dan Energi juga memiliki konsistensi yang baik dalam melaksanakan pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Konsistensi tersebut dapat diketahui dari rutinitas pelaksana kebijakan mengenai pembangunan kelistrikan sesuai dengan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.

Kecenderungan badan pelaksana juga dapat dipahami berdasarkan kutipan wawancara berikut.

“Dinas Pertambangan perlu melakukan program berkelanjutan bersama instansi terkait agar pembangunan bidang kelistrikan dapat berfungsi secara optimal” (Hasil Wawancara Informan 1, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan perlu melakukan program berkelanjutan terkait pembangunan kelistrikan. Hal ini dilakukan agar pembangunan kelistrikan dapat dilaksanakan secara optimal, sesuai Bulungan. Kecenderungan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan juga dapat dipahami melalui kutipan berikut.

“Anggaran pembangunan kelistrikan berdasarkan Perda cukup baik. Harapannya agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan baik nilai, program, dan waktu pelaksanaan” (Hasil wawancara Informan 3, 2013).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan pada dasarnya sudah memiliki anggaran yang mencukupi berdasarkan Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Pada masa yang akan datang tentunya diharapkan program pembangunan kelistrikan dapat terus berjalan dengan baik. Kecenderungan Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pihak pelaksana telah tergolong baik. Hal ini dapat diketahui dari sikap dan budaya yang dijalankan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan sangat konsisten dalam melaksanakan program pembangunan kelistrikan. Dinas pertambangan dan Energi juga sangat memahami permasalahan di bidang kelistrikan yang terdapat di Kabupaten Bulungan, sehingga dapat mencari upaya penyelesaian masalah tersebut, melalui pelaksanaan program-program pembangunan kelistrikan.

## B. Pembangunan Kelistrikan

Pembangunan Kelistrikan yang di programkan oleh Dinas Pertambangan dan energy kabupaten Bulungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang berbentuk paket pekerjaan, Pelaksanaan Paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kontraktor selaku mitra Dinas Pertambangan dan energi diatur melalui mekanisme tertentu agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan menikmati sesuai dengan *target sasaran yang ingin dicapai*. wilayah kerja yang diprogramkan meliputi wilayah kecamatan – kecamatan yang tersebar di kabupaten bulungan.

Pembangunan kelistrikan untuk daerah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan listrik pedesaan pemerintah kabupaten bulungan dalam hal ini memprogramkan kegiatan Pembangunan kelistrikan dengan membangun pembangkit PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dimana daerah tersebut dekat dengan sumber air atau dekat aliran sungai yang banyak dijumpai di daerah Kabupaten Bulungan sehingga.

Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri. Pembangunan kelistrikan harus dilaksanakan dengan program agar tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga, kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015, dan semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalui PLTS atau sumber alternatif. Pasokan listrik yang terbatas tentunya juga mempengaruhi keseluruhan pembangunan Kabupaten Bulungan. Dengan implementasi Perda APBD tentang Pembangunan kelistrikan Kabupaten Bulungan diharapkan

kebutuhan energi listrik masyarakat terpenuhi, untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan industri.

Tenaga listrik yang berhasil diproduksi dan tenaga listrik yang terjual di wilayah Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Begitu pula halnya dengan listrik yang terjual. Untuk tenaga listrik yang terjual, rumah tangga merupakan kategori pelanggan terbesar yang menggunakan tenaga listrik di kabupaten Bulungan, sedangkan untuk kategori Publik, Usaha, Industri, dan Sosial merupakan pengguna lainnya yang memiliki kebutuhan di bawah sektor rumah tangga.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik baik untuk rumah tangga maupun kegiatan ekonomi, maka dalam jangka panjang prioritas pembangunan tenaga listrik meliputi di Kabupaten Bulungan meliputi pembangunan jaringan listrik pedesaan, rehabilitasi pembangkit transmisi dan distribusi, serta pengembangan PLTS untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Sedangkan pembangunan bidang energi diprioritaskan pada kajian-kajian teknis terhadap potensi energi daerah sebagai alternatif dan substitusi pembangkit listrik tenaga diesel PLN (PLTU, PLTA, PLTMH, PLTG).

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku dinas pengelola pembangunan kelistrikan. Diantara misi tersebut terdapat beberapa butir yang berhubungan dengan pembangunan kelistrikan misi tersebut, yaitu meningkatkan mutu pelayanan energi secara profesional dan proporsional, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang

profesi, serta mencari, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumberdaya mineral dan energi baru terbarukan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. Melalui misi tersebut, dalam hal pembangunan kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi telah melakukan strategi pembangunan kelistrikan dengan cara mengembangkan pemanfaatan energi alternatif, yaitu PLTMH, PLTS, dan PLTU. Hal ini dapat diketahui dari realisasi program pembangunan kelistrikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan telah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dalam mengimplementasikan anggaran pembangunan kelistrikan.

. Pagu anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan untuk tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10

## Pagu Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan

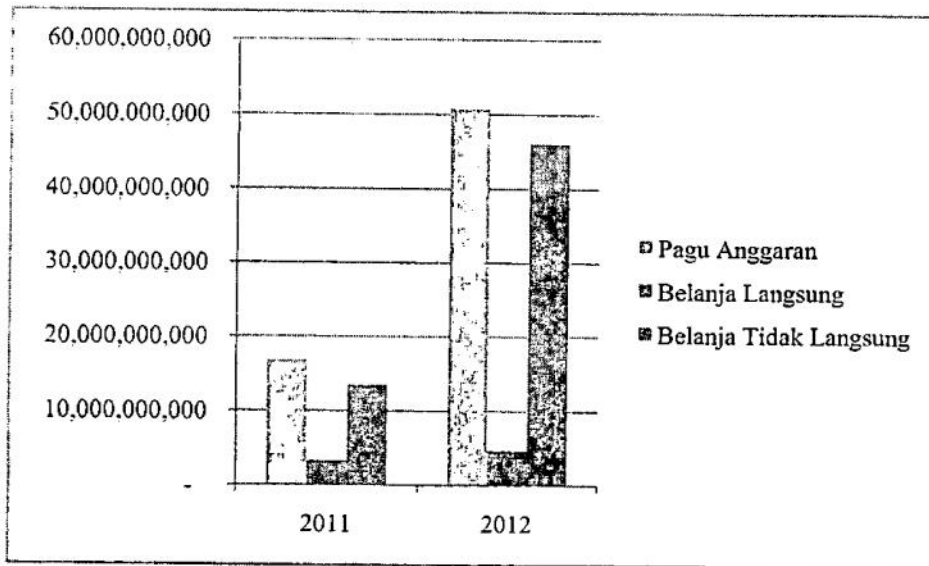
<b>Tahun</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>
2011	16,785,500,847	3,311,691,372	13,473,809,475
2012	50,844,268,614	4,710,716,200	46,133,552,414
Peningkatan	303%	142%	342%

Sumber: APBD Kabupaten Bulungan (2011-2012)

Tabel di atas dapat juga dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.7.

## Pagu Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan



Tabel dan grafik di atas menunjukkan besarnya pagu anggaran APBD Kabupaten Bulungan yang dialokasikan pada Dinas Pertambangan dan Energi. Tahun 2011, Dinas pertambangan dan Energi diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 16.785.500.847,40 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.311.691.372,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.473.809.475,40. Tahun 2012, Dinas pertambangan dan Energi diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 50.844.268.613,75, yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.710.716.200,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 46.133.552.413,75. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pagu anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Peningkatan yang terjadi pada pagu anggaran tahun 2012 adalah sebesar 303% dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012, anggaran belanja langsung meningkat menjadi sebesar 142% dibandingkan tahun 2011, sedangkan anggaran belanja tidak langsung

meningkat sebesar 342% dibandingkan tahun 2012. Namun demikian, besarnya peningkatan anggaran Dinas Pertambangan dan Energi tersebut tidak sejalan dengan peningkatan anggaran pembangunan kelistrikan. Anggaran pembangunan kelistrikan seakan berbanding terbalik dengan peningkatan yang terjadi pada peningkatan anggaran Dinas Pertambangan dan Energi secara keseluruhan. Program pembangunan kelistrikan justru semakin menurun pada tahun 2012.

Pagu anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pertambangan dan Energi tersebut termasuk untuk membiayai kegiatan tahun jamak untuk pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar Rp. 16.250.000.000,- dan Kecamatan Tanjung Palas Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,-, Kecamatan Tanjung Palas Utara-Kecamatan Sekatak sebesar Rp. 16.250.000.000,-, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Dari sisi Anggaran dana yang diberikan mengalami peningkatan di karenakan banyaknya Program yang akan dilaksanakan dan membutuhkan biaya relative besar berdasarkan perencanaan kegiatan yang meliputi seluruh daerah kabupaten Bulungan, yang jaraknya saling berjauhan dan terpisahkan oleh sungai yang mengakibatkan biaya yang besar.

Dari Sumber Anggaran pendanaan Pembangunan Kelistrikan disupalay dari dana APBD kabupaten Bulungan yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan. Dapat dilihat dari Tabel. Berikut ini, yang menerangkan besar anggaran Pembangunan Kelistrikan.



NO	PROGRAM UTAMA	URAIAN	INDIKATOR
1	Program pembinaan dan pengawasan bid. pertambangan, kelistrikan, dan SDA	Kegiatan pengawasan Pembangkit listrik Tenaga Surya dan jaringan listrik	Rp. 73.080.000,00 9 kecamatan
2.	Program pembinaan dan pengembangan bidang keteanagalistrikan	Tata batas Areal PLTMH S.Brun kecil dan Giram nyobo	Rp. 562.055.000,00 2 kecamatan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. sekatak	Rp. 967.436.447,62 1 kecamatan
		Peningkatan saluran Pembawa percontohan PLTMH di desa Brun kecil desa long bang	Rp. 267.297.397,00 1 kecamatan Hasil : berfungsinya PLTMH
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Barat	Rp. 503.293.179,09 1 kecamatan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Selor	Rp. 774.359.200,00 1 kecamatan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Peso	Rp. 524.210.701,07 1 kecamatan
		Pemeliharaan LPJU dan LPJUTS	Rp. 350.750.000,00 1 kecamatan

## Anggaran Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan Tahun 2012

NO	PROGRAM UTAMA	URAIAN	Anggaran
1	Program pembinaan dan pengawasan bid. pertambangan, kelistrikan, dan SDA	Kegiatan pengawasan tenaga listrikan dan sumber daya air	Rp. 142.122.500,00 8 Kecamatan
		Pembinaan dan pengembangan Bidang keteanagalistrikan dan SDA	Rp. 100.000.000,- 3 Kecamatan keteanagalistrikan dan Sumber daya air Hasil : Terlaksananya lapotran koordinasi
2.	Program pembinaan dan pengembangan bidang keteanagalistrikan	Koordinasi pengembangan keteanagalistrikan	Rp. 100.000.000,- 4 Kecamatan
		Pemeliharaan dan optimalisasi lampu jalan	Rp. 500.000.000,00 4 kecamatan
		Pemeliharaan percontohan PLTMH sungai Brun keci dea long bang	Rp. 1.000.000.000,00
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas	Rp. 5.025.000.000,00 1 kecamatan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Tengah	Rp. 2.525.000.000,00 1 kecamatan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Utara dan sekatak	16.250.000.000,00 1 kecamatan
		Pembangunan jaringan listrik Pedesaan kec. Tanjung Palas Timur	16.250.000.000,00 1 kecamatan

Keberhasilan pembangunan kelistrikan tentunya menyangkut banyak hal. Salah satu diantaranya adalah kecukupan anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan kelistrikan. Pada Kabupaten Bulungan pembangunan kelistrikan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan instansi teknis yang terkait. Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan tentunya juga membutuhkan anggaran yang cukup sehingga dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pertambangan dan Energi tentunya telah memberikan suatu anggaran khusus bagi pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan. Hasil yang dicapai dalam program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan ini antara lain adalah terciptanya eletrifikasi yang tinggi, dan memasyarakatkan pemanfaatan diversifikasi energi.

Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan tahun 2012 sebesar Rp. 6.095.933.335,00 dari jumlah anggaran yang tersedia yaitu Rp. 49.505.937.485,00 atau 12,31 % (termasuk belanja tidak langsung). Secara khusus Program Pembinaan dn Pengembangan Bidang ketenaga listrikan terialisasi untuk penyerapan dana sebesar Rp. 908.514.100,00 atau 2,18 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 41.700.000.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- a. Terciptanya *Electrificaty* yang tinggi
- b. Memasyarakatkan pemanfaatan disverifikasi energi

Sebagai pembanding, berikut data mengenai realisasi dan anggaran dari program pembangunan kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Bulungan.

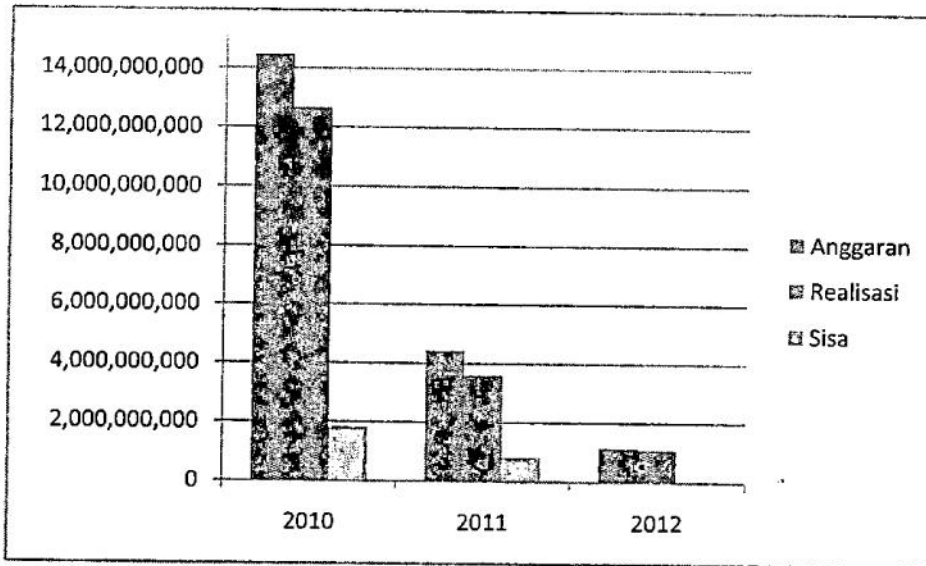
Tabel 5.13.

## Realisasi Anggaran tahun 2010-2012

No	Program	Sumber Dana	DPA	Realisasi	Sisa
<b>2010</b>					
1	Pemeliharaan LPJU dan LPJU-TS	APBD	275.454.603	226.436.337.50	49.018.265.50
2	Pembangunan pemasangan jaringan listrik pedesaan Tanjung Selor	APBD	105.000.000	97.082.350	7.917.650.00
3	Sertifikasi laik operasi jaringan listrik Kabupaten Bulungan	APBD	99.000.000	98.010.000	990.000.00
4	Pembangunan jaringan listrik pedesaan Kecamatan Tanjung Selor, Desa GN, Batubata, Mandala, Belimbing, Air Hitam	APBD	658.806.214	631.482.991	27.323.223.00
5	Pembangunan LPJU-TS (lanjutan)	APBD	8.603.450.000	7.981.233.155	622.216.845.00
6	Pembangunan jaringan listrik pedesaan Kecamatan Tanjung Selor, Desa GN Seriang-Baratan, dan Simpang Apung SP. 6 Kecamatan Tanjung Selor	APBD	1.395.277.000	1.395.277.000	-
7	Pembangunan Jaringan Feeder Espress	APBD	3.329.569.000	2.213.601.600	1.115.967.400.00
<b>Total</b>			<b>14.466.556.817</b>	<b>12.643.123.434</b>	<b>1.823.433.384</b>
<b>2011</b>					
1	Pemeliharaan LPJU dan LPJU-TS	APBD	350.750.000	315.925.000	34.825.000.00
2	Pembangunan pemasangan jaringan listrik pedesaan Tanjung Selor	APBD	774.359.200	728.561.200	45.798.000.00
3	Pembangunan pemasangan jaringan listrik pedesaan Kecamatan Sekatak	APBD	967.436.448	841.613.200	125.823.247.62
4	Pembangunan pemasangan jaringan listrik pedesaan Tanjung Palas Barat	APBD	503.293.179	475.625.200	27.667.979.09
5	Pembangunan pemasangan jaringan listrik pedesaan Kecamatan Peso	APBD	524.210.701	347.804.912	176.405.789.41
6	Peningkatan saluran pembawa percontohan PLTMH di Desa Long Bang	APBD	267.297.397	245.293.000	22.004.397.00
7	Penyediaan Ketenagalistrikan Daerah ULD Sekatak Buji Kecamatan Sekatan	APBD	1.035.346.000	629.105.464	406.240.536.00
<b>Total</b>			<b>4.422.692.925</b>	<b>3.583.927.976</b>	<b>838.764.949</b>
<b>2012</b>					
1	Pemeliharaan dan Optimalisasi LPJU Kabupaten Bulungan	APBD	341.980.500	323.872.000	18.108.500.00
2	Peningkatan saluran pembawa percontohan PLTMH Sungan Brun Kecil di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir	APBD	816.221.000	775.310.000	40.911.000.00
<b>Total</b>			<b>1.158.201.500</b>	<b>1.099.182.000</b>	<b>59.019.500,00</b>

.Grafik 5.8.

## Anggaran dan Realisasi Pembangunan Kelistrikan 2010-2012



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran pembangunan kelistrikan untuk tahun 2010 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012. Pada tahun 2010, DPA adalah sebesar Rp. 14,466,556,817,- lebih besar apabila dibandingkan DPA tahun 2011, yaitu Rp. 4,422,692,925,-, dan tahun 2012, yaitu Rp. 1,158,201,500,-. Begitu pula halnya dengan realisasi anggaran pembangunan kelistrikan. Realisasi pada tahun 2010 adalah Rp. 12,643,123,434 atau sebesar 87,40% dari anggaran pembangunan kelistrikan. Pada tahun 2011, persentase realisasi program terhadap anggaran juga mengalami penurunan, yaitu menjadi Rp. 3,583,927,976,- atau sebesar 81,03% dari total anggaran. Pada tahun 2012, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembangunan mengalami penurunan menjadi Rp. 1,099,182,000,-. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan,

realisasi telah mencapai 94,90%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan kelistrikan mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2012.

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2010 sampau dengan 2012 anggaran pembangunan kelistrikan Kabupaten Bulungan yang ditetapkan mengalami penurunan. Penurunan tertinggi adalah dari tahun 2010 dari sebesar Rp. 14,466,556,817,- menjadi Rp. 4,422,692,925 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, anggaran pembangunan kelistrikan kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 1,158,201,500,-. Begitu pula halnya dengan trend realisasi pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan. Realisasi pembangunan kelistrikan menurun dari sebesar Rp. 12,643,123,434,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 3,583,927,976,- pada tahun 2011. Pada tahun 2012, realisasi pembangunan kelistrikan kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 1,099,182,000,-. Rendahnya APBD yang dianggarkan bagi pembangunan kelistrikan pada tahun 2012 ini disebabkan rencana pembangunan yang disusun pada tahun 2012 akan direalisasikan dalam pembangunan jangka panjang. Beberapa program yang disusun pada tahun 2012 akan direalisasikan mulai tahun 2013, dan dibayarkan pada tahun 2015, sesuai dengan rencana kerja pembangunan kelistrikan. Namun demikian hal ini diatur secara tersendiri melalui Perda APBD *Multi Years*.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Anggaran Pembangunan Kelistrikan**

Isu strategis mengenai kelistrikan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kelistrikan dimana hal tersebut bias menjadi pendukung atau penghambat keberhasilan Implementasi Pembangunan Kelistrikan

Sehingga factor pendukung dan penghambat keberhasilan Implementasi Anggaran Pembangunan Kelistrikan perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan kelistrikan. Hal ini disebabkan besarnya dampak isu tersebut bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Yuwono, 2010).

Lebih jauh dikemukakan oleh Yuwono (2010) bahwa, kriteria isu-isu strategis adalah sebagai berikut: (1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; (3) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Apabila dibandingkan dengan isu mengenai kelistrikan di Kabupaten Bulungan dapat dipahami bahwa masyarakat masih banyak memberikan keluhan terhadap

pelayanan listrik di Kabupaten Bulungan. Prospektif pembangunan kelistrikan Kabupaten Bulungan 5 tahun mendatang didasarkan pada kondisi aktual saat ini dan hasil-hasil pembangunan kelistrikan yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir. Hal ini diharapkan dapat menyebabkan pembangunan kelistrikan berjalan secara berkelanjutan dan secara bertahap konsisten menuju tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan rencana pembangunan Kabupaten Bulungan adalah mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik 600 MW dengan membangun PLTU, PLTGB, PLTMH, PLTD, PLTS.

Sampai dengan saat ini dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung oleh penyediaan energi listrik yang memadai. Kapasitas terpasang hanya sekitar 6,00 MW dengan beban puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN. Kondisi ini tentunya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini. Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan kelistrikan merupakan suatu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Bulungan.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait infrastruktur kelistrikan yang menyebabkan perlunya pelaksanaan pembangunan kelistrikan yang mumpuni. Permasalahan yang terjadi dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kapasitas produksi listrik PLN masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar masyarakat belum mendapatkan pelayanan.



2. Belum dimanfaatkannya energi alternatif pengganti tenaga diesel dengan harga BBM (solar) yang cenderung meningkat sehingga biaya operasional menjadi mahal.
3. Nilai jual (TDL) yang relatif rendah dibandingkan dengan biaya produksi.
4. Kondisi geografis daerah yang sulit sehingga semakin menghambat percepatan pembangunan infrastruktur (termasuk listrik).
5. Belum adanya keterlibatan swasta dalam penyediaan energi listrik di daerah.

Kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pembangunan prasarana dan sarana baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta setiap tahun. Melihat kondisi sekarang dan perkiraan peningkatan kebutuhan dalam 20 tahun ke depan, maka penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan akan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi investasi swasta yang bergerak di bidang ketenagalistrikan apabila sumber energi lokal dapat dikembangkan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan kajian tentang pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bulungan. Permasalahan penyediaan energi listrik yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Utara dapat dijadikan peluang pasar apabila Kabupaten Bulungan mampu memproduksi listrik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan sumberdaya alternatif yang lebih murah sebagai pembangkit (PLTA, PLTG dan PLTU). Factor penghambat dan pendukung keberhasilan pembangunan kelistrikan yang ada di propinsi Kaltara kabupaten Bulungan

perlu diperhatikan untuk penunjang keberhasilan program yaitu terpenuhinya kebutuhan akan energy listrik.

Dari pembahasan diatas penghambat dan pendukung keberhasilan pembangunan kelistrikan dapat kita uraikan sebagai berikut :

- a. Faktor Pendukung keberhasilan Implementasi Anggaran Pembangunan kelistrikan dapat dilihat dari aspek-aspek pengukuran keberhasilan implementasi, yaitu
  1. Dukungan kebijakan Implementasi Anggaran Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan kelistrikan.
  2. Dukungan sumber-sumber kebijakan dalam implementasi Perda APBD. Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan dengan adanya anggaran yang besar dan peningkatan sumber daya manusianya
  3. Dukungan Komunikasi antar organisasi terkait, antara Dinas Pertambangan dan PT. PLN serta BAPEDA terjalin koordinasi yang baik.
  4. karakteristik badan pelaksana, dan kecenderungan para pelaksana tergolong baik dengan adanya program –program kegiatan yang terlaksanan dengan baik. Dan para pelaksana kegiatan sangat mendukung agar target yang diinginkan dapat tercapai.
  - 5 Dalam hal kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat dikatakan bahwa aspek tersebut sangat mendukung keberhasilan Implementasi dengan tersedianya kebutuhan akan energy listrik

tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan social serta kesatabilan politik.

b. Faktor-faktor yang masih menjadi penghambat bagi keberhasilan implementasi Perda APBD Sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan adalah

1. Jumlah aparat pelaksana di lapangan yang masih kurang memadai karena luasnya wilayah kabupten Bulungan.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemeliharaan infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun masih sangat kurang.
3. Adanya Program kegiatan yang tidak jalan akibat ketidak mampuan kontraktor dalam melaksanakan kegiatan sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat.
4. Tidak meratanya pembanguna Kelistrikan karena kondisi geografi yang luas dan banyak daerah yang tidak terjangkau dengan jalan karena dipisahkan dengan sungai sehingga membutuhkan penanganan yang lebih baik.
5. Adanya Keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai seringnya pemadaman listrik dan rendahnya tegangan listrik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan kelistrikan yang berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.
6. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Perda Pembangunan Kelistrikan.